

TESIS

**PENGANGKATAN DAN PERLINDUNGAN NOTARIS PENGANTI
(PENGATURAN DAN PRAKTIK DI SUMATERA BARAT)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan*



Disusun Oleh :

AULIA PRIMA PUTRA

152012 3024

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PENGANGKATAN DAN PERLINDUNGAN NOTARIS PENGGANTI (PENGATURAN DAN PRAKTIK DI SUMATERA BARAT)

(Aulia Prima Putra, 1520123024, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 86 hlm)

ABSTRAK

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat umum dalam bidang hukum keperdataan notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, didalam praktiknya terdapat notaris yang berhalangan dalam melakukan pelayanan dan mengeluarkan akta. Oleh karenanya didalam UUJN dikenal Notaris Pengganti. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian hukum Yuridis Empiris. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris pengganti dan serta untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan dan pelaksanaan tugas notaris pengganti khususnya di daerah Provinsi Sumatera Barat. Teori yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban, dan teori kewenangan. Dalam penjelasan dan analisa dari pasal per pasal mengenai Notaris pengganti, Pasal yang menjelaskannya antara lain Pasal 25, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 65 UUJN mengenai hal ini Notaris, Notaris pengganti memiliki kewenangan, dan tanggung jawab serta memiliki perlindungan yang sama terkait pembuatan akta otentik yang dibuat. Terkait proses pengangkatan Notaris Pengganti hal ini diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Kewenangan, Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Pengganti.

APPOINTMENT AND PROTECTION OF SUBSTITUTE NOTARIES (RULES AND PRACTICES IN WEST SUMATERA)

(Aulia Prima Putra, 1520123024, Master Program of Notary of Law Faculty of
Andalas University, 86 pages)

ABSTRACT

Notary is a public official who has authority to make authentic deed and other authorities as referred to in Article 1 number (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 Concerning Position of Notary (UUJN). As a general official in the field of civil law a notary must provide services to the public, in practice there are notaries who are unable to perform service and issue deed. Therefore, UUJN is known as Notary Substitute. The research method used by the author is the method of legal research Juridical Empirical. The purpose of this study is to analyze the responsibilities and legal protections of substitute notary and to know how the process of appointment and execution of substitute notary duties especially in West Sumatra Province. The theory used by the author in this thesis is the theory of legal protection, the theory of accountability, and the theory of authority. In the explanation and analysis of the article of the article concerning the Notary Replacement, Article which explains it, among others, Article 25, Article 27, Article 33 and Article 65 UUJN regarding this Notary, Notary substitute has authority and responsibility and has the same protection related to the making of authentic deed which are made. In relation to the process of appointment of the Notary Substitute, this is regulated separately through the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 62 of 2016 on Amendment to the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 25 of 2014 on Terms and Procedures for Appointment, Transfer, Dismissal and Renewal of Notary Period.

Keywords: Authority, Responsibility and Protection of Notary Substitute.